

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengukuran RPT

Pengukuran RPT yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur melalui dua cara yaitu dengan melihat *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan serta melalui *book value of equity* perusahaan.

2.1.1 Pengukuran RPT Berdasarkan: *Asset*, *Liabilities*, *Sales*, dan *Expenses*

Penyajian laporan keuangan yang baik adalah suatu keharusan bagi seluruh perusahaan khususnya perusahaan terbuka, maka dengan demikian laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat proporsi RPT yang terukur dari proporsi *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* sebuah perusahaan. Sesuai dengan tujuan umum laporan keuangan yang terdapat pada PSAK No.1 yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sesuai dengan tujuan umum laporan keuangan tersebut maka laporan keuangan harus memberikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas.

Aktiva dalam laporan keuangan dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar yang disajikan secara terpisah. Menurut PSAK No.1, suatu aktiva dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika aktiva tersebut:

- Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan.
- Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.

- Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Maka dengan demikian aktiva yang tidak dapat memenuhi klasifikasi tersebut digolongkan sebagai aktiva tidak lancar.

Sama seperti aktiva, kewajiban-pun dibagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang dimaksud kewajiban jangka pendek menurut PSAK No.1 adalah kewajiban yang:

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan.
2. Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

Semua kewajiban lain yang tidak memenuhi klasifikasi kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban jangka panjang.

Informasi mengenai besarnya pendapatan dan biaya-biaya yang ada dalam perusahaan dapat disajikan pada laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi suatu perusahaan menunjukkan perubahan dari kekayaan perusahaan yang dilihat dari jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan pada tahun berjalan. Selain pendapatan dan biaya-biaya, menurut PSAK No. 1, laporan laba rugi juga meliputi informasi lain yaitu:

1. Laba atau rugi perusahaan
2. Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas.
3. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan.
4. Pos luar biasa.
5. Hak minoritas
6. Laba atau rugi bersih periode berjalan

Tidak seluruh *item* mengenai informasi perusahaan dalam laporan keuangan tersebut relevan digunakan untuk melihat besaran yang terkait dengan RPT, namun hanya *item-item* tertentu saja yang relevan digunakan karena mengungkapkan proporsi transaksi yang terkait dengan RPT. Seperti pada neraca perusahaan, item-item yang terkait dengan RPT antara lain piutang hubungan istimewa dan hutang usaha pihak hubungan istimewa. Selanjutnya untuk perincian mengenai proporsi *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* dapat dilihat di catatan atas laporan keuangan. Merujuk pada peraturan Bapepem

No.VIII.G.7 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan, ada 6 hal yang harus dirinci karena terkait dengan RPT yang penilaiannya dilakukan oleh Rivano (2008) sedangkan karya akhir ini lebih lanjut akan melihat proporsi dari transaksi-transaksi yang terkait RPT yang dapat dilihat dalam catatan laporan keuangan yang merinci:

1. Jumlah masing-masing pos aktiva yang terkait dengan RPT, contohnya mengenai piutang hubungan istimewa.
2. Jumlah masing-masing pos kewajiban yang terkait RPT, contohnya mengenai hutang usaha pihak hubungan istimewa.
3. Jumlah masing-masing penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.
4. Jumlah masing-masing pembelian atau beban dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2.1.2 *Relative Share of RPT to Book Value of Equity*

Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat menentukan nilai suatu perusahaan, karena proporsi *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* yang terkait dengan RPT, lebih lanjut akan dikaitkan dengan besarnya ekuitas perusahaan sehingga dengan demikian akan diketahui persentase pengaruh transaksi-transaksi yang terkait RPT terhadap nilai ekuitas perusahaan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Cheung (2006) yang menyatakan bahwa RPT dapat memberikan dampak yang negatif terhadap nilai saham perusahaan karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap RPT. Mengacu pada percobaan Cheung tersebut maka dengan demikian, dengan menggunakan rasio RPT terhadap *book value equity*, besaran RPT dapat diukur.

2.2 Jenis Industri, CGI, dan Kapitalisasi Pasar serta Pengaruhnya Terhadap RPT

Tinggi rendahnya proporsi RPT diduga dipengaruhi oleh jenis industri, CGI, dan kapitalisasi pasar.

2.2.1 Jenis Industri

Bapepam dalam peraturan Nomor VIII.G.7 membahas tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang dimaksudkan untuk mengatur penyajian laporan keuangan yang baik bagi perusahaan-perusahaan secara umum. Laporan keuangan yang baik ini juga diperlukan untuk melihat tingkat ketaatan perusahaan-perusahaan terhadap tingkat pengungkapan transaksi-transaksi yang terkait dengan RPT sehingga proporsi *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* dari total ekuitas selanjutnya dapat diestimasi dan di analisis untuk melihat keterkaitannya dengan jenis industri.

Di Indonesia, pasar modal mengklasifikasikan jenis industri menjadi sembilan, yaitu; (1) *Agriculture* (2) *Mining* (3) *Basic Industry and Chemicals* (4) *Miscellaneous Industry* (5) *Consumer Goods Industry* (6) *Property, Real Estate and Building Construction* (7) *Infrastructure, Utilities & Transportation* (8) *Finance* (9) *Trade, Services & Investment*. Menurut Kim (2005) jenis industri dibagi menjadi dua yaitu jenis industri yang *regulated* dan industri yang *unregulated*.

Sektor industri yang *regulated* adalah sektor industri yang kegiatan usahanya secara khusus diatur oleh pemerintah, yang meliputi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan, serta asuransi. Regulasi yang mengatur perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Dana Pensiun khususnya yang terkait dengan transaksi RPT diatur pada UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang pada pasal 52 menyatakan bahwa setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun. Regulasi untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dan penjaminan yang terkait dengan transaksi RPT diatur dalam Nomor 84 / PMK.012 / 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, pada pasal 25 mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam, jumlah pinjaman, syarat-syarat pinjaman, dan pelaporan pinjaman yang diwajibkan oleh Menteri Keuangan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan perusahaan subordinasinya. Regulasi untuk

Perusahaan Perasuransi khususnya yang terkait dengan transaksi RPT diatur pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang pada pasal 13 mengatur tentang pelarangan penempatan penutupan asuransi kepada suatu Perusahaan Asuransi yang merupakan afiliasi dari perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan kecuali telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui adanya afiliasi tersebut, pelarangan melakukan penilaian kerugian atas objek asuransi yang di asuransikan Perusahaan Asuransi kerugian yang merupakan afiliasi dari perusahaan penilai kerugian asuransi yang bersangkutan, dan pelarangan memberikan jasa dari Perusahaan Konsultan Aktuaria kepada Perusahaan Asuransi Jiwa atau Dana Pensiun yang merupakan afiliasi dari perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan.

Sedangkan sektor industri lain yang tidak termasuk kedalam sektor-sektor industri tersebut dan kegiatan usahanya tidak diatur secara khusus oleh pemerintah termasuk kedalam sektor industri yang *unregulated*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kim (2005) memperlihatkan bahwa perusahaan yang *regulated* tersebut memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap pengungkapan laporan keuangan karena biasanya kegiatan operasional pada perusahaan yang *regulated* diatur oleh pemerintah sehingga dengan demikian berdampak terhadap tingkat ketaatan perusahaan yang lebih baik terhadap prinsip keterbukaan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kim (2005) tersebut tidak menyoroti secara khusus mengenai RPT tetapi merujuk pada penelitian tersebut dapat diduga bahwa sektor industri yang *regulated* memiliki tingkat keterbukaan yang lebih baik terhadap pengungkapan proporsi *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* yang berhubungan dengan RPT dari total ekuitas karena tingkat campur tangan pemerintah yang besar terhadap perusahaan tersebut untuk mengungkapkan segala macam transaksi yang dilakukan, termasuk RPT.

2.2.2 CGI

Banyak masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dewasa ini khususnya yang terkait dengan RPT karena rentan terhadap terjadinya masalah-masalah keagenan. Dalam hal ini masalah-masalah keagenan yang dapat muncul

adalah manajer, sebagaimana tugasnya adalah untuk memaksimalkan kekayaan seluruh *stakeholders*, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena terbentur masalah kepentingan dengan pemegang saham mayoritas sehingga kepentingan pemegang saham minoritas dikorbankan.

Penerapan GCG didalam perusahaan dimaksudkan untuk meminimalisasi *agency cost problem*, GCG juga diharapkan dapat mencegah terjadinya *financial disclosure* yang tidak jujur. Sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu; keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Maka dengan demikian GCG akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan publik yang tercatat di BEI dapat dilihat dari peneringkatan *Corporate Governance Index* (CGI). Pelaksanaan CGI ini dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usahanya khususnya yang berhubungan dengan pengungkapan laporan keuangan, dimana jika CGI suatu perusahaan meningkat maka tingkat pengungkapan, termasuk pengungkapan mengenai RPT, juga meningkat. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam *OECD Principles of Corporate Governance* mengungkapkan lima komponen yang dipertimbangkan dalam melakukan peneringkatan CGI, yaitu antara lain:

- *The rights of shareholders and key ownership functions.*

Pemegang saham dalam *OECD Principles of Corporate Governance* antara lain memiliki wewenang untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan, memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan, memiliki wewenang untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam pertemuan rutin pemegang saham, memiliki hak untuk memperoleh *disclosure* mengenai peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tata kelola perusahaan di pasar modal, dan adanya peraturan untuk mengungkapkan kepemilikan ekuitas yang memungkinkan pemegang saham memiliki tingkat kontrol

yang *disapropriate*. Sehingga jika hak-hak pemegang saham diberikan dengan maksimal maka skor untuk komponen ini tinggi, dimana komponen ini memiliki porsi sebesar 20% dari penilaian *score* CGI.

- *The equitable treatment of shareholders.*

Para pemegang saham harus diberlakukan secara adil antara lain dalam memperoleh informasi mengenai seri-seri dan kelas-kelas saham sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham sekalipun, para pemegang saham minoritas harus dilindungi dari praktek-praktek yang merugikan bagi mereka, dan adanya keharusan bagi pemegang saham untuk mengungkapkan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga yang mereka lakukan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap perusahaan. Perlakuan yang adil dapat berpengaruh pada skor yang tinggi pada komponen penilaian *score* CGI ini, dimana komponen ini memiliki porsi sebesar 15% dari penilaian *score* CGI.

- *The role of stakeholders in corporate governance.*

Hak-hak para *stakeholder* diatur dalam *corporate governance*, dimana perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG harus menghormati adanya kesepakatan saling menguntungkan dengan *stakeholders* dan keberadaannya dilindungi oleh hukum. *Stakeholders* juga turut berpartisipasi dalam proses *corporate governance* sehingga mereka harus memiliki akses informasi yang relevan, cukup, dan dapat dipercaya. Semakin tinggi partisipasi *stakeholders* dalam proses penerapan GCG maka semakin tinggi nilai CGI perusahaan, dimana komponen ini memiliki porsi sebesar 15% dari penilaian *score* CGI.

- *Disclosure and transparency.*

Dalam penerapan GCG yang baik, pengungkapan yang harus dilakukan meliputi delapan informasi-informasi yang terkait dengan situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, yang salah satunya menyebutkan keharusan pengungkapan mengenai informasi-informasi yang terkait dengan RPT. Informasi-informasi tersebut haruslah dipersiapkan dan diungkapkan dengan standar kualitas akuntansi dan keuangan serta non-keuangan yang tinggi. Untuk

mendukung keterbukaan informasi maka diperlukan *external auditors* yang *accountable* dan audit tahunan yang *independent, competent*, dan *qualified* sehingga menghasilkan laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya. Tingkat *disclosure* dan *tranparency* yang baik akan tercermin dari penilaian *score* CGI yang tinggi, dimana komponen ini memiliki proporsi sebesar 25% dari penilaian *score* CGI.

- *The responsibilities of the board.*

Anggota board (di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu komisaris dan direksi) harus memiliki informasi-informasi yang diperlukan untuk bertindak adil bagi para pemegang saham dan mereka juga harus memiliki standar etis yang tinggi dalam aktivitasnya memonitor tingkat efektifitas pelaksanaan corporate governance, memastikan keterbukaan dalam proses pemilihan anggota board, dan meminimalisasi potensi conflict of interest antara management, anggota board, dan pemegang saham, termasuk meminimalisasi praktek-praktek RPT yang menyesatkan. Jika penilaian komponen ini tinggi maka penilaian *score* CGI perusahaan juga tinggi, dimana komponen ini memiliki porsi sebesar 25% dari penilaian *score* CGI.

Namun, penelitian mengenai pengaruh CGI terhadap RPT belum pernah dilakukan dan merujuk pada *country paper* yang dilakukan oleh Utama (2008) yang menyoroiti RPT lebih lanjut menyatakan bahwa jika suatu perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan sesuai maka praktek-praktek RPT yang menyesatkan tidak akan terjadi, dikarenakan praktek-praktek RPT yang menyesatkan tidak sesuai dengan prinsip GCG khususnya prinsip mengenai keterbukaan.

2.2.3 Kapitalisasi pasar

Nilai kapitalisasi pasar merupakan persepsi mengenai nilai sebuah perusahaan dan secara positif mencerminkan nilai saham suatu perusahaan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat hubungan dan pengaruh kapitalisasi pasar terhadap estimasi besaran nilai RPT, yaitu antara lain yang dilakukan oleh Freeman (1987) dan Lang and Lundholm (1993) di dalam

Setianto (2005) membuktikan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Namun penelitian yang menyoroti secara khusus hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan RPT belum pernah dilakukan, tetapi dapat diduga jika suatu perusahaan lebih besar daripada perusahaan yang lainnya maka ketaatan perusahaan dalam melaporkan dan merinci besaran transaksi yang terkait RPT semakin baik. Karena semakin besar ukuran perusahaan dan tingkat kapitalisasi pasarnya yang semakin tinggi maka diharapkan perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang tinggi oleh karenanya pengawasan dari investor dan tuntutan atas pengungkapan terhadap kegiatan perusahaan semakin besar hal ini akan mengakibatkan tingkat pengungkapan RPT yang tinggi. Sehingga dengan demikian kebutuhan investor akan informasi yang benar dan terbuka akan terpenuhi.

2.3 Kesimpulan Terhadap Tinjauan Literatur dan Identifikasi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilihat bahwa jenis industri yang *regulated* dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap tingkat transparansi pengungkapan laporan keuangan, serta CGI, dan kapitalisasi pasar dapat memberikan pengaruh secara positif terhadap tingkat transparansi pengungkapan laporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya serta isu-isu yang perlu untuk diteliti lebih lanjut adalah:

1. Penelitian-penelitian yang terdahulu hanya menyoroti tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan secara umum dan tidak secara khusus melakukan pengukuran mengenai besarnya RPT. Maka perlu diteliti mengenai pengukuran RPT.
2. Terdapat pengaruh positif dari jenis industri terhadap tingkat keterbukaan pengungkapan laporan keuangan, namun penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara khusus mengenai tingkat keterbukaan pengungkapan besaran transaksi yang terkait dengan RPT. Oleh karena itu perlu diteliti pengaruh jenis industri terhadap tingkat keterbukaan pengungkapan laporan keuangan khususnya yang terkait dengan RPT.

3. Terdapat pengaruh positif dari CGI terhadap tingkat keterbukaan pengungkapan laporan keuangan, namun penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara khusus mengenai tingkat keterbukaan pengungkapan besaran transaksi yang terkait dengan RPT. Oleh karena itu perlu diteliti pengaruh CGI terhadap tingkat keterbukaan pengungkapan laporan keuangan khususnya yang terkait dengan RPT.
4. Terdapat pengaruh positif dari tingkat kapitalisasi pasar terhadap tingkat keterbukaan pengungkapan laporan keuangan, namun penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara khusus mengenai tingkat keterbukaan pengungkapan besaran transaksi yang terkait dengan RPT. Oleh karena itu perlu diteliti pengaruh tingkat kapitalisasi pasar terhadap tingkat keterbukaan pengungkapan laporan keuangan khususnya yang terkait dengan RPT.

